

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Pernyataan Publikasi	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	xii
<i>Abstract</i>	xiii
Motto dan Persembahan.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoretis	15
2. Manfaat Praktis	16
E. Kerangka Konseptual dan Teoritis	16
1. Kerangka Konseptual	16
a. Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah.....	16
b. Insentif Pegawai BLUD	18
2. Kerangka Teoritis.....	19
a. Teori Tindak Pidana Korupsi	20

b. Teori Sistem Hukum	22
F. Metode Penelitian	24
1. Metode Pendekatan	24
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Data.....	25
a. Data Primer.....	25
b. Data Sekunder	25
1) Bahan Hukum Primer	26
2) Bahan Hukum Sekunder	27
3) Bahan Hukum Tersier.....	28
4. Metode Pengumpulan Data.....	28
a. Wawancara	28
b. Studi Kepustakaan	29
5. Lokasi Penelitian.....	30
6. Metode Analisis Data.....	30
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Badan Layanan Umum	32
1. Badan Layanan Umum Daerah	37
2. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kraton Pekalongan.....	37
a. Wilayah dan Prospek Pelayanan RSUD Kraton.....	37
b. Sejarah Pelayanan RSUD Kraton.....	38
B. Hukum Keuangan Negara.....	40
1. Pengertian Hukum Keuangan Negara.....	44
2. Ruang Lingkup Hukum Keuangan Negara	47

3. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Negara.....	48
C. Hukum Administrasi Negara	49
D. Penegakan Hukum	57
1. Komponen Sistem Hukum Pidana	59
E. Tindak Pidana Korupsi	67
1. Tindak Pidana.....	67
2. Pidana Korupsi	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Pemberian Insentif Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan	78
1. Gambar Besar Struktur Organisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan	78
2. Sistem Kepegawaian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan	79
3. Norma Hukum yang Mengatur Tata kelola BLUD RSUD Kraton Pekalongan	81
a. Remunerasi	87
b. <i>Incentive</i> atau <i>Pay for Performance</i>	87
1) Ruang Lingkup Remunerasi dan Insentif Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Ditinjau dari Norma Hukum yang Mengaturnya.....	88
B. Pengaturan Pemberian Insentif Pegawai di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan yang Berpotensi Korupsi	98
C. Pengelolaan Uang dan Solusi yang Diperlukan untuk Mengurangi Potensi Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pemberian Insentif Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan	107
1. Kasus Posisi	110

2. Pembahasan.....	111
a. Pembuktian Unsur dalam Delik Pidana Korupsi Badan Layanan Umum Daerah RSUD	112
1) Unsur “Setiap Orang”	112
2) Unsur “Melawan Hukum”	116
3) Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi	119
4) Unsur “Merugikan keuangan negara ”	120
5) Unsur “Menyalahgunakan Wewenangnya, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan”	121
6) Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta Melakukan”.....	123
BAB IV PENUTUP	127
A. Simpulan	127
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131